

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Literatur Riview**

Untuk menganalisis pengaruh perdagangan tradisional wilayah perbatasan terhadap pola perbuahan sosial masyarakat Sebatik, penulis mencoba melihat pada rujukan penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki topik yang sama atau tema yang sama dengan penelitian penulis.

Rujukan bahan pertama yang digunakan oleh penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Sri Suwartiningsih, David Samiyono, Daru Purnomo dari Universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai harmonisasi sosial yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Jagoi Babang karena adanya simpul perekat di mana masyarakat di perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan kekerabatan yang berasal dari keturunan suku Dayak Bidayuh, sehingga mereka memiliki rumah adat yang sama, baik di wilayah perbatasan Indonesia (di Kecamatan Jagoi Babang) dan di Kampong Bau, Sarawak. Mereka melakukan adat upacara Gawai sebagai budaya bersama yang dilakukan secara bergantian setiap bulan November. Melalui budaya Gawai, mereka dapat saling berkunjung sebagai kerabat tanpa ada batasan negara.

Perbedaan yang penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah dari studi kasus wilayahnya, di mana penulis akan menggunakan studi kasus wilayah pulau Sebatik. Perbedaan sosial bisa dilihat dari kegiatan masyarakat perbatasan di Kecamatan jagoi Babang (Indonesia) melakukan upacara

adat bersama masyarakat Kampong Bau Serawak (Malaysia). Sedangkan penulis menjelaskan tentang pengaruh perdagangan tradisional antara Indonesia-Malaysia yang menyebabkan pola perubahan sosial masyarakat Sebatik.

Rujukan bahan kedua yang penulis gunakan adalah jurnal yang ditulis oleh Djoko Marihandono Wilayah yang berjudul Perbatasan Kalimantan barat: Sumber Sejarah dan Permasalahannya. Dalam jurnal tersebut tidak hanya menjelaskan aktivitas masyarakat dan ekonomi juga menjelaskan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan tidak akan pernah kunjung selesai apabila tidak ditangani secara terpadu. Permasalahan pergeseran batas wilayah dapat disebabkan kedua belah pihak.

Masyarakat tetangga yang memerlukan lahan demi eksploitasi bisnisnya tentunya akan berusaha untuk memperoleh lahan yang lebih luas. Sementara itu, batas wilayah dapat pula dilakukan oleh bangsa kita sendiri, yang merasa tidak memperoleh pelayanan yang cukup memadai dari pemerintah daerah setempat. Pemindahan patok batas negara sengaja dipindah dengan harapan untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang lebih baik bila dibandingkan dengan apabila mereka menjadi warga negara Indonesia.

Pada studi kasus di atas menjelaskan permasalahan pergeseran patok batas wilayah oleh masyarakat tetangga yang memerlukan lahan demi eksploitasi bisnisnya tentunya akan berusaha untuk memperoleh lahan yang lebih luas. Perbedaan yang penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah studi kasus yang menjelaskan perbatasan sebagai penyebab utama perubahan sosial masyarakat Sebatik dengan melakukan perdagangan tradisional.

Maka dari itu perbatasan merupakan hal yang penting bagi sebuah negara karena banyaknya interaksi yang terjadi di perbatasan membuat masyarakat juga ikut terkena dampak dari itu.

Rujukan bahan yang ketiga yang penulis gunakan berjudul Mendorong Perdagangan Lintas Batas, jurnal ini ditulis oleh Gusmadi Bustami. Tulisan ini membahas berbagai macam tema seperti Tajuk Utama Perbatasan Negara sebagai Teras Depan Bangsa di dalam tema tersebut ada penjelasan terkait dengan kerjasama bilateral di bidang jasa, kedua negara memandang ini sebagai suatu potensi yang perlu dikembangkan.

Malaysia mengusulkan adanya kerjasama bilateral di sektor jasa kesehatan, pariwisata, pendidikan, konstruksi dan pertukaran pelaku bisnis, sedangkan Indonesia mengusulkan penambahan kerjasama di sektor Engineering, pertukaran tenaga Professional, dan Medium Skilled Workers. Dalam upaya peningkatan kerjasama perdagangan, Indonesia mengusulkan agar kedua negara ini melakukan promosi bersama khususnya promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi di negara ketiga. Indonesia menyampaikan bahwa instansi pemerintah Indonesia yang terlibat dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Dari pembahasan rujukan bahan yang ketiga penulis membedakan kegiatan yang di lakukan selain perdagangan tradisional yang mengubah pola masyarakat perbatasan juga dari pihak negara Malaysia sendiri mengusulkan kerjasama disektor jasa kesehatan, pariwisata, pendidikan, konstruksi dan pertukaran pelaku bisnis.

Sedangkan Indonesia mengusulkan penambahan kerjasama disektor Engineering, pertukaran tenaga Professional dan Medium Skilled Workers.

Rujukan bahan yang ke empat jurnal yang di tulis oleh Humphrey Wangke yang berjudul perdagangan Lintas batas anatar-negara memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu. Tulisan ini membahas tentang Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Belu memiliki potensi ekonomi untuk melakukan perdagangan antar-negara di perbatasan.

Hasil bumi dan kerajinan tangan dapat dijadikan sebagai andalan bagi kedua kabupaten ini untuk melakukan perdagangan langsung. Namun sayangnya masih banyak kendala yang dihadapi seperti koordinasi antar-lembaga tinggi negara dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kehadiran BNPP maupun BPP sebagai koordinator pembangunan di perbatasan masih belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Perbedaan dari bahan rujukan tersebut penulis mengambil dari sisi sebab akibat di mana perdagangan tradisional menyebabkan perubahan sosial sedangkan bahanrujukan di atas menjelaskan masalah ekonomi dari perdagangan lintas batas. Tidak bisa di pungkiri lagi perdagangan tradisional antar masyarakat perbatasan banyak mengalami perubahan baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain.

## **2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual**

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang di anggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh

penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah di tentukan. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, antara lain:

### **2.2.1. Kerjasama Internasional**

Kerjasama dapat terjalin dan terlaksana sebagai akibat adanya penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan yang di ambil oleh aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.<sup>1</sup>

Kerjasama dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor negara menjalin hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> (Pfaltgraff, 1971)

<sup>2</sup> (Ibid hal 148-149)

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.<sup>3</sup>

Ada dua Bentuk Kerjasama Internasional:

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang hanya dilakukan dua Negara. Kerjasama antar dua negara memiliki arti, makna, dan tujuan untuk saling menguntungkan antar kedua negara. Kerjasama antara dua negara berlangsung dalam segala bidang, yakni bidang politik, pertahanan, sosial, budaya, dan ekonomi. Di era modernisasi dan globalisasi, negara-negara tidak dapat berjalan sendiri, tidak tertutup, dan tidak hanya mengandalkan potensi yang dimiliki.

Seberapa kuat dan seberapa besar potensi yang dimiliki suatu negara, tetap tidak bisa berkembang dan maju tanpa kerjasama dengan negara lain. Potensi yang dimiliki didistribusikan pada negara-negara lain, dan potensi yang tidak dimiliki didatangkan (ekspor) dari negara-negara lain. Mengingat hal tersebut, negara-negara maju perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara berkembang, dan lebih penting negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan

---

<sup>3</sup> (Pfaltgraf, 1997 )

Malaysia perlu melakukan kerjasama intensif dan komprehensif dalam memajukan segala bidang, termasuk bidang sosial ekonomi pada kedua negara.

Penelitian ini kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua Negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan yang membutuhkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Atas dasar itu pemerintah Indonesai beserta dengan pemerintah Malaysia melakukan kerjasama bilateral terkait daerah perbatasan, kerjaaama tersebut dinamakan Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia).

Aktivitas perdagangan yang terjadi antara daerah-daerah perbatasan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Seperti halnya pada daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur dikawasan ini.

Pemerintah pun memberikan fasilitas paspor khusus bagi pelintas batas di mana aktivitas mereka bisa setiap hari melewati perbatasan 2 negara yang saling bersengketa itu karena aktivitas perdagangan yang mereka lakukan. Pelabuhan laut Tunon Taka yang berada di Nunukan dan Pelabuhan laut di Sebatik urat nadi perdagangan para pelintas batas setiap hari, bagitu juga di Tarakan. Dari pelabuhan Tunon Taka terdapat 6 kapal ferry dan 12 speed boat yang melayani penyeberangan ke Tawao.

Sementara, dari pelabuhan Tawao ada beberapa kapal ferry, di antaranya KM Labuhan II, siap melayani penumpang dari Tawao setiap hari. Masing-masing kapal dan speed boat tersebut melayani rute Nunukan-Tawao lebih dari 2 trip setiap hari. Aktivitas perdagangan di kawasan Nunukan-Sebatik-Tawao menjadi pintu gerbang bagi kedua negara untuk masuknya masing-masing komoditi yang dihasilkan kedua negara. Namun, daya tarik Tawao menjadi magnet bagi para pedagang di kawasan tersebut untuk datang ke sana. Oleh karena itu, beberapa komoditi hasil bumi dan laut dari Indonesia sudah terbiasa dipajang di pasar.

### **2.2.2. Teori Perdagangan Internasional**

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.

Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan



tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.

#### a. Teori Klasik Dalam Perdagangan Internasional

- 1.) Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi, walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai.
- 2.) Ricardo adalah seorang Pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar Mazhab Klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir, metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. David Ricardo telah mengembangkan pemikiran-pemikiran Adam Smith secara lebih terjabar dan juga lebih sistematis. Dan pendekatannya teoretis deduktif, pemikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya untuk mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu: teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional dan, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi.

## **Manfaat perdagangan internasional**

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
4. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Aktivitas dagang yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara yakni Masyarakat Sebatik Indonesia dan Tawau Malaysia akan berdampak kepada kepentingan ekonomi yang dimana masyarakat menjual dan membeli barang dari Tawau Malaysia dan menjual hasil laut dan bumi ke Malaysia.

### **2.2.3. Teori Hubungan Internasional**

Menurut Mc. Clelland, Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.<sup>4</sup> Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia.<sup>5</sup>

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, budaya dan interaksi lainnya antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara. Hubungan internasional juga mengkaji tentang politik Internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, Politik Dunia dan Politik Internasional memiliki arti yang sama (Sinonim).<sup>6</sup>

Sedangkan menurut K.J. Holsti, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antarnegara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa

---

<sup>4</sup> (McClelland, 1986)

<sup>5</sup> (Holsti, 1992)

<sup>6</sup> (Kauppi P. R., 1993)

dalam masyarakat Internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut.<sup>7</sup> Pendapat para sarjana Hubungan Internasional salah satunya dari Schwarzenberger<sup>8</sup> yang menyatakan bahwa ilmu hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang harus mempelajari masyarakat Internasional.

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.<sup>9</sup>

Ada dua kenyataan yang dihadapi dalam memahami hubungan internasional. Pertama, bahwa masyarakat internasional adalah sangat berbeda dengan masyarakat nasional. Masyarakat internasional terdiri dari aktor-aktor yang memiliki kedaulatan sendiri atau berada dibawah kedaulatan yang berbeda, karena itu tidak tunduk pada satu kekuatan politik dan hukum yang terpusat. Untuk memahami interaksi diantara mereka memerlukan pemahaman yang menyeluruh baik dari aspek politik maupun sejarahnya.

Kedua, ilmu hubungan internasional memerlukan pendekatan dan alat (metoda) tersendiri yang berbeda dengan pendekatan atau cara pandang kajian politik umumnya. Kedua kenyataan ini berhadapan dengan kenyataan lainnya yaitu peperangan antar bangsa-bangsa Eropa disatu sisi dan keinginan orang untuk hidup damai telah mendorong para ilmuwan ketika itu untuk mengajukan pemikiran teoritik di bidang hubungan internasional.

---

<sup>7</sup> (Holst, 1992)

<sup>8</sup> (Schwarzenberger, 1964)

<sup>9</sup> (Newham, 1990)

## **Strukturalis**

Aktor utama dalam hubungan internasional terdiri dari negara dan aktor non negara. Hubungan internasional adalah keterkaitan global yang didalamnya aktor negara dan non negara saling berinteraksi. Globalis menekankan bahwa hubungan antar aktor internasional ini membentuk struktur internasional.

Sangat penting untuk melihat hubungan internasional dari perspektif sejarah. Penganut globalis baik dari aliran Marxis maupun non Marxis mendefinisikan karakteristik sistem internasional sebagai sistem kapitalis. Karena itu diperlukan kajian sejarah munculnya kapitalisme pada abad ke 16 di Eropa Barat, perkembangannya, perubahannya, dan perluasannya hingga saat ini sehingga terbentuknya sebuah dunia sistem kapitalis. Pentingnya faktor ekonomi dalam hubungan internasional.

Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik Strukturalis mengawali asumsinya bahwa ekonomi adalah kunci untuk memahami, kreasi, evolusi, dan fungsi dari sistem dunia saat ini. Berbagai aktor saling tawar-menawar, saling bersepakat, dan membangun koalisi didalam dan pada lintas batas sehingga membangun struktur global. Munculnya isu Utara-Selatan merupakan akibat dari hubungan struktural ini.

Hubungan Internasional yang terjadi antara masyarakat Sebatik Indonesia dan Tawao Malaysia Di mana hubungan antara masyarakat Sebatik Indonesia dan Tawao Malaysia dalam segala bentuk interaksi dari ekonomi, sosial, budaya politik, sehingga dalam hal ini dapat di katakan interaksi yang di lakukan oleh masyarakat

perbatasan merupakan dari teori Hubungan Internasional sebagai penguat dari fakta yang terjadi.

#### **2.2.4. Teori Perbatasan**

Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat tiga permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.<sup>10</sup>

Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia.<sup>11</sup>

Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> (Rumusan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur, 2013)

<sup>11</sup> (Ketut Ardhana, 2007)

<sup>12</sup> (Tirtosudarmo., 2002)

Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:<sup>13</sup>

1) Artificial Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain lain.

2) Natural boundaries

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah.

3) (Anthropo-geographic boundaries)

Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam ethnic-cultural background yang merupakan batas wilayah kebangsaan.

---

<sup>13</sup> (Ibid)

### 2.2.4.1. Profil dan Wilayah Negara Indonesia

Gambar 1.



Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau.<sup>14</sup> Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara.<sup>15</sup> Dengan populasi Hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018,<sup>16</sup> Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.<sup>17</sup>

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

---

<sup>14</sup> (Prasetya, 2017.)

<sup>15</sup> (Kroef, (1951))

<sup>16</sup> (Statistik, t.thn.)

<sup>17</sup> (Statistik., 2016.)



Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya.

Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan/atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra.

Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3 abad, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta modernisasi yang pesat.

Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa

(ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.<sup>18</sup>

Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"), bermakna keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan/negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota OECD.

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara<sup>19</sup> yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil,<sup>20</sup> sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni<sup>21</sup>, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU – 11°08'LS dan dari 95°BT – 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

---

<sup>18</sup> (Leo Suryadinata, 2003)

<sup>19</sup> (Dotinga, 2000)

<sup>20</sup> (Prasetya, Merdeka Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB , 2017)

<sup>21</sup> (Siaran pers. ., 2007)

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup>. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km<sup>2</sup>, Sumatera dengan luas 473.606 km<sup>2</sup>, Kalimantan dengan luas 539.460 km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas 189.216 km<sup>2</sup>, dan Papua dengan luas 421.981 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,<sup>22</sup> searah penjuru mata angin, yaitu:

Tabel 1

Perbatasan Negara Indonesia dengan Negara lain

<u>Utara</u>	Negara <u>Malaysia</u> dengan perbatasan sepanjang 1.782 km <sup>23</sup> , <u>Singapura</u> , <u>Filipina</u> , dan <u>Laut Tiongkok Selatan</u>
<u>Selatan</u>	Negara <u>Australia</u> , <u>Timor Leste</u> , dan <u>Samudra Indonesia</u>
<u>Barat</u>	<u>Samudra Indonesia</u>
<u>Timur</u>	Negara <u>Papua Nugini</u> dengan perbatasan sepanjang 820 km, <u>Timor Leste</u> , dan <u>Samudra Pasifik</u>

<sup>22</sup> (55, 1982 )

<sup>23</sup> (International Monetary Fund. Estimate World Economic Outlook Database. , 2007)

#### 2.2.4.2. Profil dan Wilayah Negara Malaysia

Gambar 2



Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi.<sup>24</sup> Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan - Malaysia Barat dan Malaysia Timur - oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan.<sup>25</sup> Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina.<sup>26</sup> Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika.<sup>27</sup>

Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya

---

<sup>24</sup> (Malaysia)

<sup>25</sup> (CIA, 2006.,)

<sup>26</sup> (CIA, 2006.,)

<sup>27</sup> (CIA, 2006.,).

untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong<sup>28</sup>. dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri.<sup>29</sup> Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.<sup>30</sup>

Malaysia sebagai negara federal tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.<sup>31</sup>

Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia termasuk dengan Federasi Malaya.<sup>32</sup> dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura<sup>33</sup> saat tahun-tahun awal pembentukan federasi baru terdapat pula tentangan dari Filipina dan konflik militer dengan Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> (Yang di-Pertuan Agong biasa disebut "Raja", "Kepala", atau "yang Agung")

<sup>29</sup> (Pasal 33. Konstitusi Malaysia.)

<sup>30</sup> (Malaysia I. U., 2007)

<sup>31</sup> (Time, 1957)

<sup>32</sup> (Jalan menuju kemerdekaan. Divisi Penelitian Federal, Perpustakaan Kongres, 2006)

<sup>33</sup> Majalah Time. The Art of Dispelling Anxiety. Agustus.

<sup>34</sup> United Nations — Treaty No. 8029

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru.<sup>35</sup> Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya.<sup>36</sup> Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia.<sup>37</sup> Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula Ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional, seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota Negara-Negara Persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D-8 (Developing-8), yakni sebuah kesepakatan untuk kerja sama pembangunan delapan negara anggotanya: Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> (Bożyk, (2006))

<sup>36</sup> (Menteri., 2007)

<sup>37</sup> (University, 2007)

<sup>38</sup> (Kementerian Luar Negeri T. , 2015)

### 2.2.4.3. Perbatasan Indonesia-Malaysia

Gambar 3.



Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia-Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia-

Singapura. Sebagian perbatasan ini ditetapkan melalui Perjanjian Perbatasan Landas Benua pada tahun 1969 dan Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut pada 1970. Perbatasan landas benua antara Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan juga ditarik di sepanjang garis dasar benua antara kedua negara berdasarkan perjanjian 1969.

Perbatasan di Laut Sulawesi telah menjadi subjek persengketaan antar kedua negara. Persengketaan tersebut diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Meskipun demikian, kedua negara ini masih memiliki klaim yang saling tumpang tindih sehubungan dengan perbatasan, misalnya Ambalat.

Terdapat sejumlah transportasi laut yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, sebagian besarnya antara Sumatra dan Semenanjung Malaysia, dan sebagian kecil antara Kalimantan Utara dan Sabah. Satu-satunya perlintasan darat yang menghubungkan kedua negara ini terdapat di Entikong (Indonesia)/Tebedu (Malaysia). Perbatasan Indonesia-Malaysia, baik darat atau laut, memiliki celah yang menyebabkan masuknya sejumlah besar pekerja imigran ilegal dari Indonesia ke Malaysia.

Penetapan perbatasan Indonesia-Malaysia berawal dari perjanjian pada tahun 1824 antara Belanda dan Britania Raya, yang ditandatangani di London pada tanggal 17 Maret 1824. Perjanjian tersebut menetapkan lingkup pengaruh kepulauan Melayu antara dua kekuatan kolonial pada masa itu – Britania Raya dan Belanda. Britania Raya diizinkan untuk mendirikan koloni di sebelah utara Selat Malaka dan Selat Singapura, sedangkan Belanda berhak mendirikan koloni di



sebelah selatan. Pemisahan lingkup pengaruh ini menjadi dasar penetapan perbatasan antara Malaya Britania dengan Hindia Belanda di kemudian hari.

Dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London, yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda.<sup>39</sup> Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1915<sup>40</sup> dan 1928<sup>41</sup>, yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan perbatasan.

Perjanjian dan sejumlah kesepakatan kolonial kemudian diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penerus pemerintahan kolonial Belanda dan Britania Raya. Penundaan status perbatasan maritim di Laut Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat, menunjukkan bahwa negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada perbatasan darat.

Pada tanggal 26 November 1973, nota kesepahaman ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan survei bersama dan demarkasi perbatasan darat kedua negara. Kerja sama ini dimulai pada 9 September 1975 dan selesai pada Februari 2000. Hingga 2006, sebanyak 19 nota kesepahaman dengan 28 peta lokasi yang terkait dengan perbatasan telah ditandatangani oleh kedua negara, yang meliputi jarak 1.822,3 km dari 2.019,5 jarak perbatasan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> (Convention between Great Britain and the Netherlands Defining the Boundaries in Borneo, , 1891)

<sup>40</sup> (Agreement between the United Kingdom and the Netherlands relating to the Boundary between the State of North Borneo and the Netherland Possessions in Borneo, 1915.)

<sup>41</sup> (Convention between His Majesty in respect of the United Kingdom and Her Majesty the Queen of the Netherlands respecting the Delimitation of the Frontier between the States in Borneo under British Protection and Netherlands Territory in that Island, 1928)

<sup>42</sup> (Ahmad Fauzi, 2006)

### **2.2.5. Konsep Kualitas Hidup**

World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup (Quality of life) merupakan persepsi individu terkait dengan kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan system nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan, standard dan juga perhatian terhadap kehidupan. Kualitas hidup dapat dipengaruhi berbagai aspek seperti kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>43</sup>

Kualitas hidup merupakan bagian dari kesejahteraan sosial seperti yang Muhammad Suud, 2006, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, Preastasi Pustaka Publisher: Jakarta didefinisikan oleh Segal dan Bruzzy yang mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.<sup>44</sup>

Untuk dapat menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang layak maka perlu diciptakan kondisi lingkungan yang mendukung, resposif, dan memberdayakan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah Indonesia beserta dengan pemerintah Malaysia bekerjasama dan sepakat untuk membuat kerjasama bidang sosial ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan di kedua negara terutama dalam permasalahan sosial dan ekonomi.

---

<sup>43</sup> (Fahrudin, 2012)

<sup>44</sup> (Suuda, 2006)

Kerjasama ini dinilai penting dan perlu karena jika permasalahan ini tidak teratasi dan berlarut-larut maka akan menjadi bom waktu bagi Indonesia khususnya. Perlu diketahui bahwa taraf kehidupan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia sangat mengkhawatirkan dan masih dibawah standar. Bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia jauh lebih tertinggal perekonomiannya dan rasa ketergantungan terhadap Malaysia semakin tidak dapat dipungkiri.

### **2.3. Preposisi / Hipotesis**

Berdasarkan identifikasi masalah, perumusan masalah dan kerangka teoritis serta pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

Jika pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk melakukan kerjasama Perdagangan melalui organisasi bilateral Sosek Malindo, maka ekonomi wilayah perbatasan Sebatik antara dua negara akan mengalami peningkatan.

### **2.4. Vertifikasi Variabel dan Indikator**

Agar lebih memperjelas dan sebagai pemikiran atas hipotesis yang telah penulis paparkan di atas, maka vertifikasi variabel dituangkan sebagai berikut:

**Tabel 2****Vertifikasi Variabel dan Indikator**

<b>Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Vertifikasi (Analisis)</b>
<b>Variabel Bebas:</b> Jika pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk melakukan kerjasama Perdagangan melalui organisasi bilateral Sosek Malindo.	1) Perjanjian kerjasama BTA(Border Trade Area)	1) Pemerintah Indonesia-Malaysia sepakat menyelesaikan Perundingan Perjanjian Perdagangan Perbatasan (Review Border Trade Agreement/BTA) pada tahun 2018.(sumber: <a href="https://ekbis.sindonews.com">https://ekbis.sindonews.com</a> )
	2) Perjanjian kerjasama BCA (Border Cross Agreement)	2) General Border Committee (GBC) Malindo menjelaskan, BCA antara Indonesia dan Malaysia disepakati pada 1967.(Sumber: <a href="https://www.merdeka.com">https://www.merdeka.com</a> )
	3) Kerjasama Sosek Malindo	3) Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutra Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.(Sumber: <a href="https://kabarbenua.com">https://kabarbenua.com</a> )
<b>Variabel Terikat:</b> Maka ekonomi wilayah perbatasan akan meningkat.	1) Impor	1) Secara kumulatif nilai impor Januari-September 2018 mencapai US\$ 70,11 juta, mengalami kenaikan sebesar 391,58 persen dibanding periode yang sama di tahun 2017. (Sumber: <a href="https://nunukankab.bps.go.id/pressreleas e.htm">https://nunukankab.bps.go.id/pressreleas e.htm</a> )
	2) Ekspor	2) Secara kumulatif nilai ekspor non migas periode Januari-Juli 2018 mencapai US\$ 646,03 juta atau naik 27,54 persen dibanding periode yang sama di tahun 2017. (Sumber: <a href="https://nunukankab.bps.go.id/pressreleas e.htm">https://nunukankab.bps.go.id/pressreleas e.htm</a> )

## 2.5. Skema dan Alur Penelitian

### Pengaruh Perdagangan Tradisional Wilayah Perbatasan Terhadap Pola Perubahan Sosial Masyarakat Sebatik

Gambar 4.

